

Apakah Dana Desa dan Pendapatan APBD Mempengaruhi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia?

Pardomuan Robinson Sihombing¹, Dyah Purwanti²

¹BPS-Badan Pusat Statistik, ²Politeknik Keuangan Negara STAN

¹robinson@bps.go.id, ²dyahpurwanti@pknstan.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
03-08-2022	10-08-2022	11-08-2022

Abstrak - Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Dana Desa dan pendapatan APBD terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Indonesia. Adapun pendekatan pendapatan dan belanja menggunakan variabel pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa. Data bersumber dari Bappenas dan Badan Pusat Statistik periode 2018-2021. Adapun metode statistik yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linier berganda dengan data panel. Berdasarkan pengujian model panel, model Fixed merupakan model yang terbaik. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap IPEI. Secara parsial, PAD, pendapatan pajak, DAU, DAK dan dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap IPEI. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan kebijakan komprehensif terkait ekonomi makro-sosial agar tingkat IPEI Indonesia terus meningkat.

Kata Kunci: DAK, Dana Desa, DAU, IPEI, Pajak, PAD

Abstract - This study aims to examine the effect of APBD revenues and expenditures the Inclusive Economic Development Index (IEDI) in Indonesia. The income approach uses the variables of Regional Original Revenue (ROR), Tax Revenue, General Allocation Fund (GAF), Special Allocation Fund (SAF) and Village Fund. The data is sourced from Bappenas and the Central Statistics Agency for the period 2018-2021. The statistical method used is quantitative method with multiple linear regression with panel data. Based on panel model testing, Fixed model is the best model. Simultaneously all variables affect IEDI. Partially, ROR, tax revenues, GAF, SAF and village funds have a significant positive effect on IEDI. Based on the results of this study, comprehensive policies related to macro-social economy are needed so that Indonesia's IPEI level continues to increase.

Keywords: GAF, IEDI, ROR, SAF, tax

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan kesempatan terhadap akses pendidikan serta kesehatan merupakan masalah yang masih dihadapi oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk mengukur keberhasilan terhadap permasalahan itu pemerintah melalui Bappenas meluncurkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). IPEI adalah alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. IPEI terdiri atas tiga pilar yaitu mengukur melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. IPEI pertama dirilis untuk periode tahun 2011, dimana IPEI Indonesia sebesar 4.79.

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai IPEI Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang diakibatkan adanya pandemi COVID -19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Pilar pertumbuhan mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020, namun untuk pilar kedua dan ketiga, yaitu ketimpangan/kemiskinan dan akses/kesempatan terus mengalami kenaikan.



Sumber: Bappenas, 2022

Gambar 1. Nilai IPEI Indonesia 2014-2021

Pertumbuhan ekonomi inklusif regional tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan dan penyusunan perencanaan perekonomian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penduduk di daerah tersebut. Penguatan kapasitas fiskal daerah terus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi baik secara nasional maupun regional. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk pengalokasian anggaran salah satunya belanja pemerintah agar program pembangunan ekonomi yang sudah tersusun

dapat tercapai sehingga pembangunan ekonomi di daerah terlaksana secara optimal dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya penguatan fiskal daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan masing-masing daerah misalkan melalui peningkatan pendapatan pajak dan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan perekonomian, mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sehingga nilai IPEI bisa terus meningkat (Panggabean et al., 2022). Penelitian lain adalah Hunaifi (2022) yang meneliti pengaruh dana perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di enam provinsi di Pulau Jawa. Penelitian tersebut menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan menaikkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa. Temuan ini menguatkan bahwa dana perimbangan dan kapasitas fiskal daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif daerah. Namun, bukti empiris dari Manek dan Badrudin (2016) membuktikan bahwa pendapatan asli daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan, dana perimbangan tidak signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari sisi belanja daerah, berbagai penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Primawan (2020) belanja pendidikan dan belanja kesehatan meningkatkan IPEI, sementara belanja perlindungan sosial dan belanja ekonomi tidak memengaruhi IPEI. Obyek penelitian Primawan menggunakan populasi Pemerintah Provinsi di Indonesia. Safitri, Ananda, & Prasetyia (2021) meneliti pengaruh dari belanja fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, dan fungsi pendidikan sebagai variabel utama serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel kontrol terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi Jawa Timur.

Temuan mereka adalah belanja fungsi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan PDRB per

kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif pada jangka panjang, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif. Dalam jangka pendek, belanja kesehatan dan pendidikan belanja fungsi kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, namun belanja fungsi ekonomi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

Berdasarkan inkonsistensi temuan sebelumnya, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan dua cara. Pertama, penelitian menggunakan unit analisis meliputi seluruh provinsi di Indonesia, dalam periode observasi tahun 2018-2021. Kedua, untuk memperdalam analisis, selain kapasitas fiskal, kami juga menambahkan faktor dana desa sebagai determinan pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah. Program Dana Desa dimaksudkan untuk membangun infrastruktur desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat persediaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan di desa. Sebagaimana temuan Arfiansyah (2020) yang menemukan bahwa dana desa menurunkan kemiskinan di desa, dan Rimawan & Aryani (2019) dana desa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima.

Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kebijakan dalam memperkuat kapasitas fiskal baik desa maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi Bappenas (2022) dan Badan Pusat Statistika pada publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi (BPS, 2022b) dan publikasi Statistik Keuangan Desa (BPS, 2022a). Penelitian ini berfokus pada seluruh provinsi di Indonesia dengan masa penelitian tahun 2018-2021 kecuali DKI Jakarta. Hal dikarenakan DKI Jakarta tidak mendapatkan anggaran dana desa dan DAU. Variabel dependen dan independen dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen	Satuan	Skala Data	Transformasi Data
Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Poin	Rasio	
Variabel Independen	Satuan	Skala Data	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural
Pendapatan PAJAK (Pajak)	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural
Dana Alokasi Khusus (DAU)	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural
Dana Alokasi Umum (DAK)	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural
Dana Desa	Rupiah	Rasio	Logaritma Natural

Model regresi yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Ada tiga jenis pemodelan dalam regresi data panel, yaitu *common/pooled* model, *fixed-effect* model, dan *random effect* model (Baltagi, 2005). Tes pemilihan model dilakukan untuk

menentukan model terbaik yang menginformasikan hubungan antar variabel. Tes pemilihan panel dapat dilihat pada Tabel 2.

Setelah memilih model terbaik, tes asumsi klasik dilakukan. Tes ini dilakukan untuk memastikan bahwa model dapat digunakan untuk melihat

pengaruh antar variabel dan memprediksi nilai variabel dependen dari nilai yang diketahui dari variabel independent (Gujarati, 2004). Uji asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel2. Tes Pemilihan Model Panel

Uji Panel	Model	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif
Tes LM BP		Model pooled/ common lebih baik daripada Fixed	Model Fixed lebih baik daripada Model Pooled/ common
Tes Chow		Model pooled/ common lebih baik daripada Random	Model Random lebih baik daripada Model Pooled/ common
Tes Hausman		Model Random lebih baik daripada Fixed	Model fixed lebih baik daripada Random

Tabel3. Tes Asumsi Klasik

Uji Asumsi	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif
Long Run Normalitas Test	Data terdistribusi normal	Data tidak berdistribusi normal
Uji White	Varian data Homokedastis	Varian data Heterokedastis
Uji Korelasi LM	Model Non-Autokorelasi	Model Autokorelasi

Setelah model terbaik dipilih dan memenuhi asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah menguji kebaikan model (Walpole, 2012). Kebaikan tes model dapat dilihat pada Tabel 4. Setelah semua kriteria

pengujian model terpenuhi, interpretasi persamaan regresi yang terbentuk dilakukan.

Tabel4. Model Goodness Test

Goodness of Fit Test	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif	Tolak Ho
Koefisien Determinasi Uji/ adjusted R square	R square > 0,5		
Tes Simultan / Tes F	Model Tidak fit/ Semua variabel tidak berpengaruh	Model fit / minimal 1 variabel memiliki efek yang signifikan	Prob. Nilai < 0,05
Tes Parsial / Uji T	Variabel independen tertentu tidak berpengaruh	Variabel independent berpengaruh	Prob. Nilai < 0,05

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap IPEI
- H₂: Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap IPEI
- H₃: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap IPEI
- H₄: Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap IPEI
- H₅: Dana Desa berpengaruh signifikan positif terhadap IPEI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan diawali dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel dalam penelitian selama periode penelitian. Tabel 5 menunjukkan analisis deskriptif. Rata-rata, nilai indeks pembangunan

ekonomi inskusif di Indonesia adalah 5.76 poin. Nilai IPEI tertinggi adalah 6.82 di Bali pada tahun 2019, dan terendah adalah 3.22 poin di Provinsi Papua pada tahun 2019. Rata-rata, PAD di Indonesia adalah 3.616.701.665 rupiah. PAD tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada 2021 dan terendah di Sulawesi Barat pada 2018. Rata-rata, pendapatan dari pajak di Indonesia sebesar 4.152.285.215 rupiah. Nilai pendapatan pajak tertinggi di Gorontalo pada tahun 2021, dan terendah di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018. Rata-rata, DAU Indonesia sebesar 1.736.980.886 rupiah. Nilai DAU tertinggi di Provinsi Papua pada tahun 2021, dan terendah di Kalimantan Timur pada tahun 2018. Nilai DAK rata-rata adalah 1.950.387.332 rupiah. Nilai DAK tertinggi adalah di Jawa Barat pada tahun 2021, dan terendah di Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Nilai rata-rata dana desa di Indonesia sebesar 2.031.541.566. Nilai dana desa tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2021, dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020.

Tabel5. Analisis Deskriptif

Deskriptif	<i>IPE</i>	<i>PAD</i>	<i>pajak</i>	<i>DAU</i>	<i>DAK</i>	<i>dana desa</i>
Mean	5.76	3616701665	4152285215	1736980886	1950387332	2031541566
Median	5.79	1863272365	1407108359	1496193065	1131746761	1285252091
Standard Deviation	0.57	4882770587	7456507281	909310248	2261018556	1964440557
Minimum	3.22	301499588	267741502	767682423	8086243	69924744
Maximum	6.82	25066632129	43375000000	8112620037	11325013744	8640253889

Persyaratan dalam model regresi adalah tidak ada hubungan/multikolinearitas tinggi antara variabel independen, seperti yang terlihat dari nilai Variant Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Pada Tabel 6, semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari sepuluh dalam penelitian ini. Ini berarti semua variabel independen yang digunakan dalam model.

Tabel6. Uji Multikolinearitas Variabel Independen

Variabel	VIF
PAD	2.369070
DAU	2.799895
PAJAK	1.271974
DAK	2.646190
Dana Desa	2.482359

Tabel7. Uji Model Panel

Ujian	Nilai Uji	Prob. Nilai	Kesimpulan
Uji LM BP	112.25	0.00	Model Random lebih baik daripada Model Common / Pooled
Tes Chow	12.72	0.00	Model Fixed lebih baik daripada Model Common / Pooled
Tes Hausman	40.07	0.00	Model Fixed lebih baik daripada Model Random

Sebelum menganalisis lebih lanjut modeling dalam analisis regresi data panel, pemilihan model panel dilakukan menggunakan tes yang disebutkan di bagian metodologi melalui tiga tes pada Tabel 7. Model efek Setelah model panel dipilih, maka model panel yang dipilih tidak ditafsirkan secara langsung tetapi diuji untuk asumsi klasik. Tes ini dimaksudkan agar model yang dipilih dapat digunakan keduanya untuk melihat efek prediksi. Asumsi yang digunakan adalah asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pada Tabel 8, asumsi normalitas terpenuhi. Nilai probabilitas lebih signifikan dari 0,05. Di sisi lain, masih ada pelanggaran heteroskedastisitas dan asumsi autokorelasi. Nilai probabilitas setiap tes kurang dari 0,05.

Tabel8. Tes Asumsi Klasik

Ujian	Nilai Uji	Prob. Nilai	Kesimpulan
Normality Test	1.86	0.393	Normalitas Heteroskedastisitas
Uji White Korelasi Seri	57.56	0.000	Autokorelasi
LM	47.46	0.000	

Karena pelanggaran heteroskedastisitas dan asumsi autokorelasi, model fixed ditransformasi menggunakan model generalized linier model dan penambahan lag data (Greene, 2018). Mode final yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel9. Tes hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-27.14281	5.511432	-4.924820	0.0000
PAD	0.655486	0.088613	7.397163	0.0000
DAU	0.832706	0.148937	5.590989	0.0000
PAJAK	0.215446	0.072634	2.966198	0.0043
DAK	0.006840	0.001123	6.091744	0.0000
Dana Desa	0.039151	0.007280	5.377714	0.0000
Cross-section fixed (dummy variables)		Durbin-Watson stat		2.158111
R-squared	0.962844	Adjusted R-squared		0.939311
F-statistic	40.91576	Prob(F-statistic)		0.000000

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 9 di atas, dimana nilai koefisien determinasi sebesar 0.9393. Nilai koefisien ini berarti bahwa semua variabel independen dapat menjelaskan variasi IPEI sebesar 93.93 persen; sisanya 6,07 persen dipengaruhi variabel lain di luar model. Pada uji F menunjukkan bahwa semua variabel independen bersama-sama memengaruhi IPEI. Hasil ini diidentifikasi oleh nilai probabilitas statistik $F = 0.00$ lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hasil ini berarti bahwa pemodelan yang dilakukan sesuai.

Berdasarkan uji parsial yang diidentifikasi dengan nilai probabilitas uji t menunjukkan semua variabel signifikan berpengaruh, dengan kata lain hipotesis penelitian diterima, dimana nilai probabilitasnya sebesar $0.000 < \alpha 0.05$. Jika dilihat dari koefisiennya semua variabel berpengaruh positif. Persamaan regresi terbentuk:

$$IPEI = -27.14 + 0.6554*PAD + 0.832*DAU + 0.215*Pajak + 0.0068*DAK + 0.0391*Dana\ Desa$$

Pembahasan:

LNPAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPEI dengan koefisien sebesar 0.655486 dengan nilai $t\ stat = 7.397163 > t\ tabel = 1,96$. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen PAD akan meningkatkan IPEI sebesar 0.65 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini senada dengan penelitian Mokorowu et al., (2020) serta Saputera dan Pandoyo (2020) yang menyatakan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap perekonomian. Peningkatan PAD akan meningkatkan kemampuan daerah untuk membangun infrastruktur daerah dan peningkatan akses masyarakat sehingga peluang IPEI juga akan cenderung meningkat.

Pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPEI dengan koefisien sebesar 0.215446 dengan nilai $t\ stat = 2.966198 > t\ tabel = 1,96$. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen Pajak akan meningkatkan IPEI sebesar 0.215 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Hal penelitian ini senada dengan penelitian Saragih (2018) dimana hasil yang diperoleh dari riset ini adalah: penerimaan pajak provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia.

DAU memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPEI dengan koefisien sebesar 0.832706 dengan nilai $t\ stat = 5.590989 > t\ tabel = 1,96$. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen DAU akan meningkatkan IPEI sebesar 0.832 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil penelitian ini senada dengan Mokorowu et al., (2020) dan Panggabean et al. (2022), dimana DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya bantuan dana perimbangan maka daerah semakin memiliki tambahan dana untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia.

DAK memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPEI dengan koefisien sebesar 0.006840 dengan nilai $t\ stat = 6.091744 > t\ tabel = 1,96$. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen DAK akan meningkatkan IPEI sebesar 0.0068 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini senada dengan Mokorowu et al., (2020) dan Panggabean et al. (2022),

dimana DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya bantuan dana perimbangan maka daerah semakin memiliki tambahan dana untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia.

Dana desa memiliki pengaruh signifikan positif terhadap IPEI dengan koefisien sebesar 0.039151 dengan nilai $t\ stat = 5.377714 > t\ tabel = 1,96$. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 persen dana desa akan meningkatkan IPEI sebesar 0.039 poin dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini senada dengan penelitian Rimawan dan Aryani (2019) serta Arfiansyah (2020), dimana porsi pemanfaatan Dana Desa masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dan kemiskinan dapat diturunkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh Dana Desa dan Pendapatan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif (IPEI) di seluruh provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Dana Desa, PAD, pendapatan pajak, DAU, DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPEI. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan kebijakan komprehensif terkait ekonomi makro-sosial agar tingkat IPEI Indonesia terus meningkat, misalnya penggunaan pendapatan daerah untuk membangun infrastruktur yang meningkatkan perekonomian serta dana bantuan yang bersifat produktif bagi masyarakat.

Untuk penelitian lebih lanjut, dimungkinkan untuk menambahkan variabel independen potensial lainnya yang memengaruhi IPEI, misalnya dari APBD dari sisi pengeluaran. Selain itu dapat mempelajari pengaruh ke masing-masing pilar dalam IPEI yaitu aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Pemodelan IPEI selanjutnya dapat menggunakan model panel lainnya dengan menggunakan efek random atau efek spasial dalam model panel.

REFERENSI

- Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Lisyabab*, 1(1), 91-106.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (Third). John Wiley & Sons Ltd.
- Bapenas. (2022). *DATA: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif*. <http://inklusi.bappenas.go.id/indeks>
- BPS. (2022a). *Statistik Keuangan Desa 2021*.
- BPS. (2022b). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021*.
- Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics BY Gujarati* (pp. 1–1002). McGraw-Hill Inc.
- Hunaifi, Aang (2022) *Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Jumlah Penduduk, Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada*

- 6 Provinsi Di Pulau Jawa Indonesia Tahun 2014-2019. S1 Thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Marianus Manek1, Rudy Badrudin. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis* Vol. 17, No. 2, Desember 2016, hal. 81-98
<http://journal.stimykpn.ac.id/index.php/tb>
- Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh, Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(04), 81–94.
- Panggabean, H. L., Hariani, D., & B, A. Y. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *Owner*, 6(2), 2200–2208.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>
- Primawan, M.I. (2020) *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 33 Provinsi Di Indonesia)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287-295.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F, (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif jawa timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85-96.
- Saputera, A. G. E., & Pandoyo. (2020). Pengaruh DAU, PAD, DAK Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekbank*, 3(2), 17–28.
<https://www.jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/38>
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Sikap*, 3(1), 17–27.
- Walpole, R. E. (2012). *Probability & Statistics for Engineers & Scientists*. Pearson.